

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 4 September 2014

Subyek : Amdal

Hal : 11

# Amdal Harus Bisa Diterima Masyarakat

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan bahan gamping dan lempung PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harus bisa diterima secara sosial. Selama ini masih banyak masyarakat terdampak yang menolak pembangunan pabrik itu sehingga persoalan tersebut harus segera diselesaikan.

Hal itu dikemukakan anggota tim komisi penilai amdal dari Universitas Diponegoro, Semarang, Dwi P Sasongko, dalam Sidang Komisi Amdal Pembangunan Pabrik Semen PT SMS di Pati, Rabu (3/9).

Sidang itu melibatkan tim penyusun amdal dari PT Mitra Adi Pranata, tim komisi penilai dokumen amdal dari para akademisi dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, serta sejumlah masyarakat di wilayah terdampak dan lembaga swadaya masyarakat. Sidang tersebut diwarnai unjuk rasa sekitar 500 warga Kecamatan Tambakromo dan Kayen yang menolak pembangun pabrik semen itu.

Menurut Dwi, amdal itu harus memiliki kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, dan sosial. Dari keempat hal itu, masalah sosial perlu mendapat perhatian penuh karena masih banyak warga yang menolak rencana pembangunan pabrik semen tersebut.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membangun forum dialogis antara perusahaan dan masyarakat. "Kalau hal itu buntu, masyarakat bisa menempuh jalur hukum, yaitu menggugat izin lingkungan yang nantinya diterbitkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara," katanya.

Berdasarkan survei yang dilakukan tim penyusun amdal, sebanyak 67 persen masyarakat di Kecamatan Tambakromo dan Kayen menolak pembangunan pabrik semen, 20 persen menerima, dan 13 persen tidak menjawab. Mayoritas masyarakat yang menerima berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, dan wiraswasta, sedangkan yang menolak berprofesi sebagai petani.

Sementara itu, tim penyusun amdal pembangunan pabrik semen dan penambangan bahan gamping dan lempung PT SMS, merekomendasikan pabrik semen boleh dibangun di kawasan Pegunungan Kendeng. Namun, pembangunan itu harus memperhatikan, antara lain, pelestarian sumber-sumber air, masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta revitalisasi kawasan yang telah ditambang.

"Kami masih harus merevisi dokumen amdal itu karena masih banyak masukan dari masyarakat dan tim komisi penilai amdal. Setidaknya membutuhkan waktu sebulan untuk menyempurnakannya, lalu menyerahkannya ke Pemerintah Kabupaten Pati," kata ketua tim penyusun amdal, Poerna Sri Oetari.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, dokumen amdal yang telah direvisi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan memberikan izin pembangunan pabrik semen atau tidak.